

Pesantren dan Pluralisme: Warisan Gus Dur dalam Pendidikan Multikultural

Bayu Mujrimin

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Pesantren; Pluralism;
Gus Dur; Multicultural
Education; Tolerance

ABSTRACT

Pesantren, as a traditional Islamic educational institution, plays a strategic role in shaping the religious character and worldview of Indonesian society. Historically, Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) emerged as a prominent figure who successfully transformed pesantren values into a moral and intellectual force that supports principles of pluralism and diversity. This study aims to examine how Gus Dur's legacy of thought and activism in promoting pluralism has influenced the development of multicultural education within pesantren environments. Using a qualitative descriptive approach through literature review and documentation, the study finds that pesantren inspired by Gus Dur's ideas have begun to develop inclusive curricula and educational practices that emphasize tolerance and openness to religious, ethnic, and cultural differences. Core values such as *tasamuh* (tolerance), *tawasuth* (moderation), and *ta'awun* (interfaith cooperation) serve as key pillars in cultivating a multicultural pesantren culture. The study concludes that Gus Dur's legacy is not only an intellectual inspiration but also a practical educational model that responds to the challenges of diversity in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article history:

Received 11 01, 2025

Revised 11 06, 2025

Accepted 11 12, 2025

Corresponding Author:

Bayu Mujrimin

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email: bayumuhsinin10@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi di dunia. Keberagaman ini mencakup aspek agama, etnis, bahasa, dan budaya yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 270 juta penduduk. Secara demografis, Indonesia memiliki enam agama resmi yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang semuanya hidup berdampingan di bawah payung ideologi negara, Pancasila (Departemen Agama RI, 2020). Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh sekitar 86,7% penduduk Indonesia, disusul oleh Kristen Protestan (7,6%), Katolik (3,1%), Hindu (1,7%), dan agama-agama lainnya (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023).

Selain dari sisi agama, keberagaman etnis di Indonesia juga sangat kompleks. BPS mencatat lebih dari 1.300 kelompok etnik tersebar di seluruh nusantara, dengan suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, dan Dayak sebagai kelompok besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika sosial dan budaya (BPS, 2020). Bahasa daerah yang digunakan mencapai lebih dari 700 bahasa, yang menjadi cerminan kekayaan budaya sekaligus tantangan dalam membangun komunikasi dan integrasi nasional (Mulyadi, 2018).

Dari sisi budaya, Indonesia memiliki sistem nilai, adat istiadat, seni, dan tradisi yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki upacara adat, tarian tradisional, sistem kepercayaan lokal, hingga

kearifan lokal yang unik. Budaya-budaya lokal ini telah menjadi identitas sekaligus modal sosial dalam memperkuat kohesi sosial di tengah pluralitas masyarakat Indonesia (Haryatmoko, 2017).

Namun demikian, keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan tanpa tantangan. Dalam konteks sosial-politik, keberagaman dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana. Isu-isu seperti intoleransi agama, diskriminasi etnis, dan politik identitas masih menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas dan integrasi nasional. Oleh karena itu, pendekatan multikulturalisme dan pendidikan nilai-nilai toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dalam bingkai kebhinekaan (Subagyo, 2021).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia telah memainkan peran penting dalam proses pembentukan karakter dan moral bangsa sejak masa pra-kemerdekaan hingga era modern. Dalam konteks pendidikan nasional, pesantren bukan sekadar institusi pengajaran agama, tetapi juga pusat pembentukan etika, integritas, dan nilai-nilai kebangsaan. Keberadaan pesantren telah terbukti mampu melahirkan generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keindonesiaan (Zarkasyi, 2011).

Salah satu keunggulan pesantren adalah pendekatan pendidikan berbasis nilai (*value-based education*), yang secara konsisten menanamkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini ditanamkan melalui proses pembelajaran yang bersifat holistik dan terintegrasi antara ilmu, spiritualitas, dan praktik kehidupan sehari-hari (Azra, 2012). Pola asuh kiai, interaksi intensif antara santri dan guru, serta tradisi hidup bersama di lingkungan pondok menjadikan pesantren sebagai model pendidikan karakter yang efektif dan kontekstual (Abdullah, 2015).

Lebih jauh, pesantren juga berperan dalam membentuk kesadaran kebangsaan melalui integrasi antara nilai-nilai keislaman dan kebhinekaan. Dalam sejarahnya, banyak tokoh nasional yang lahir dari rahim pesantren, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, hingga KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mengusung visi Islam yang toleran dan berwawasan kebangsaan. Pesantren menjadi benteng moderasi beragama (*wasathiyah*) yang menolak radikalisme dan ekstremisme, serta mendukung kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis (Lukens-Bull, 2005).

Di tengah tantangan globalisasi dan krisis moral generasi muda, pesantren hadir sebagai kekuatan strategis dalam menjaga jati diri bangsa. Melalui pendidikan berbasis akhlak dan kebudayaan lokal, pesantren mampu merawat nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi dalam pembangunan karakter bangsa. Oleh karena itu, memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional menjadi sebuah keniscayaan untuk mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki semangat kebangsaan yang kokoh (Muhaimin, 2020).

KH. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam Indonesia modern. Sebagai seorang intelektual, kiai pesantren, dan Presiden Republik Indonesia keempat, Gus Dur meletakkan dasar pemikiran yang kuat tentang pluralisme dalam konteks kebangsaan dan keislaman. Pemikiran pluralisme Gus Dur berangkat dari keyakinan bahwa Islam yang hidup di Indonesia harus bersanding harmonis dengan realitas sosial yang beragam, baik secara agama, etnis, maupun budaya (Barton, 2002).

Pengalaman hidup Gus Dur sebagai santri di berbagai pesantren serta pendidikan akademiknya di Timur Tengah dan Barat membentuk cara pandangnya yang luas dan inklusif terhadap perbedaan. Baginya, pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga ruang pembentukan kesadaran sosial dan kebangsaan. Dalam banyak tulisannya, Gus Dur menekankan

pentingnya membumikan nilai-nilai Islam dalam konteks kebudayaan lokal dan menjaga keutuhan bangsa melalui dialog antaragama (Wahid, 2001). Ia menolak keras pandangan eksklusivisme agama dan justru mengajak umat Islam untuk terbuka, dialogis, dan menerima perbedaan sebagai sunnatullah (fitrah kemanusiaan).

Salah satu kontribusi penting Gus Dur terhadap pesantren adalah revitalisasi peran pesantren sebagai agen perubahan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU (1984–1999), Gus Dur mendorong pesantren untuk lebih aktif dalam isu-isu kemasyarakatan, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian lintas agama (Bruinessen, 1994). Ia juga menegaskan bahwa pesantren harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah yang moderat.

Konsep pluralisme Gus Dur bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan terwujud dalam tindakan konkret, seperti pembelaannya terhadap kelompok minoritas agama, advokasi terhadap hak warga Tionghoa, dan keterlibatannya dalam dialog lintas iman di dalam dan luar negeri (Bubalo & Fealy, 2005). Warisan pemikirannya menjadi inspirasi bagi banyak pesantren untuk membuka diri terhadap wacana kebangsaan dan kemanusiaan yang universal, serta menjadikan pluralisme sebagai bagian dari kurikulum nilai dan praktik kehidupan di lingkungan pesantren.

Dengan demikian, kontribusi Gus Dur terhadap pluralisme dan pesantren terletak pada keberaniannya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan semangat kebangsaan dan kemanusiaan. Ia menunjukkan bahwa pesantren, sebagai lembaga keagamaan yang berbasis tradisi, mampu menjadi kekuatan transformasi sosial yang menjunjung tinggi perdamaian, toleransi, dan keadilan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap penguatan nilai-nilai pluralisme di lingkungan pesantren. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi pendidikan multikultural yang berkembang di pesantren sebagai bagian dari warisan intelektual dan praksis sosial Gus Dur. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran pesantren dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena terkait pesantren dan pluralisme sebagai warisan pemikiran Gus Dur dalam konteks pendidikan multikultural. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam fenomena sosial dan budaya, bukan sekadar pengukuran kuantitatif (Creswell, 2014). Dengan metode deskriptif, penelitian berfokus pada penyajian data secara sistematis dan objektif mengenai kontribusi Gus Dur dalam mengembangkan pendidikan multikultural di lingkungan pesantren.

Dalam penelitian ini, pendekatan studi pustaka (*library research*) digunakan sebagai metode pengumpulan data utama. Studi pustaka memungkinkan peneliti mengkaji literatur yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta sumber-sumber lain yang membahas tentang Gus Dur, pesantren, pluralisme, dan pendidikan multikultural (Bowen, 2009). Pendekatan ini sangat sesuai untuk memahami konteks teoritis dan historis sekaligus mengkaji berbagai perspektif tentang hubungan antara pesantren dan pemikiran pluralisme Gus Dur.

Data yang diperoleh dari sumber pustaka kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola konseptual yang

mendukung tujuan penelitian (Krippendorff, 2013). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta-fakta yang ada, tetapi juga menggali makna serta implikasi pemikiran Gus Dur dalam kerangka pendidikan multikultural di pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Konsep Pesantren

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tradisional yang telah lama menjadi bagian integral dari sistem pendidikan dan kehidupan sosial di Indonesia. Definisi pesantren menurut Koentjaraningrat (2009) adalah lembaga pendidikan yang berbasis pada pengajian kitab kuning dengan metode pembelajaran yang khas, yaitu santri tinggal di asrama dan mendapatkan bimbingan langsung dari kiai sebagai guru sekaligus pemimpin spiritual. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan karakter yang membentuk kepribadian santri secara holistik.

Secara struktural, pesantren memiliki organisasi yang relatif sederhana namun fungsional. Struktur inti pesantren meliputi kiai atau pengasuh sebagai pemimpin utama, para ustadz atau guru pengajar, santri sebagai peserta didik, serta pengurus yang membantu administrasi dan pengelolaan pesantren (Mukhlis, 2014). Kiai tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai figur sentral yang membimbing kehidupan sosial dan spiritual di lingkungan pesantren. Interaksi intens antara kiai dan santri berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang mendukung proses pendidikan secara efektif.

Dari segi peran sosial, pesantren memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembentukan masyarakat Indonesia. Pesantren berfungsi sebagai agen sosial yang menginternalisasi nilai-nilai keagamaan sekaligus nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (Azra, 2012). Selain melahirkan ulama dan tokoh agama, pesantren juga menjadi pusat pengembangan kebudayaan lokal, penguatan identitas Islam moderat, dan fasilitator dialog antar kelompok sosial yang beragam. Pesantren berperan dalam menjaga kohesi sosial dan mendorong harmoni antarumat beragama melalui pendidikan yang menekankan toleransi dan kemanusiaan (Lukens-Bull, 2005).

Selain itu, pesantren berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus berakhlak mulia, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dengan fungsi ganda sebagai institusi pendidikan dan pusat sosial budaya, pesantren tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan modernitas dan pluralitas sosial di Indonesia.

B. Pluralisme dalam Islam

Keberagaman merupakan sebuah realitas sosial yang tak terelakkan, terutama dalam konteks masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Dalam perspektif keagamaan, khususnya Islam, keberagaman dihargai dan dipandang sebagai bagian dari sunnatullah (ketetapan Tuhan) yang harus diterima dengan sikap toleransi dan penghormatan (Nasr, 2002). Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit mendorong umat Islam untuk menghormati perbedaan dan membangun kerukunan antar sesama manusia.

Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal" (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Ayat ini mengandung pesan penting tentang pluralitas dan keberagaman manusia sebagai sarana untuk saling mengenal dan menghargai,

bukan untuk saling bermusuhan atau memandang rendah. Selain itu, konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) juga mengajarkan prinsip persatuan di tengah perbedaan, sehingga umat Islam didorong untuk mengedepankan persaudaraan dan kerjasama.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan nilai pluralisme dan toleransi. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak menzalimi dan tidak membiarkannya tersakiti” (Muslim, 2007). Hadis ini menegaskan bahwa harmoni sosial dan saling melindungi antar individu merupakan bagian penting dari ajaran Islam.

Pendekatan keagamaan terhadap keberagaman tidak hanya berhenti pada prinsip penghormatan, tetapi juga menekankan dialog dan musyawarah (syura) sebagai metode penyelesaian perbedaan (Hefner, 2000). Islam menolak paksaan dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 256: “Tidak ada paksaan dalam agama” (QS. Al-Baqarah [2]: 256), yang membuka ruang bagi kebebasan berkeyakinan dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan.

Dalam konteks ini, berbagai ulama dan pemikir Islam kontemporer menegaskan pentingnya moderasi beragama (wasathiyah) sebagai sikap yang menyeimbangkan antara keyakinan dan penghormatan terhadap keberagaman sosial. Pendekatan ini penting untuk mencegah eksklusivisme dan fundamentalisme yang dapat memecah-belah umat serta masyarakat luas (Azyumardi Azra, 2011).

Secara keseluruhan, dalil-dalil keagamaan dan pendekatan yang diajarkan Islam menawarkan kerangka yang kuat untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis dalam menghadapi keberagaman.

C. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa dalam masyarakat. Prinsip utama pendidikan multikultural adalah pengakuan terhadap hak setiap individu untuk mempertahankan identitas budaya sekaligus membangun kesadaran akan persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Banks, 2010). Pendidikan ini menekankan pada penghargaan terhadap perbedaan serta mendorong sikap toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam interaksi sosial.

Tujuan pendidikan multikultural adalah membentuk peserta didik yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan sosial dan emosional untuk hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Lebih jauh, pendidikan ini bertujuan menciptakan kesadaran kritis terhadap isu-isu ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan stereotip yang sering muncul akibat perbedaan budaya dan latar belakang sosial (Gay, 2018). Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, mengajak peserta didik untuk aktif membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Penerapan pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain: integrasi konten budaya dalam kurikulum, penggunaan metode pembelajaran yang inklusif dan partisipatif, serta pengembangan sikap empati dan penghargaan terhadap perbedaan (Nieto, 2010). Di lingkungan pendidikan formal, seperti sekolah dan pesantren, hal ini dapat diwujudkan melalui pengajaran materi yang mencerminkan keragaman budaya dan agama di Indonesia, pelibatan komunitas lokal dalam kegiatan pembelajaran, serta pembentukan iklim sekolah yang menghargai keberagaman (Banks & Banks, 2010).

Dalam konteks pesantren, penerapan pendidikan multikultural sangat relevan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Pesantren sebagai lembaga tradisional Islam dapat mengintegrasikan pendekatan multikultural dalam kurikulum serta kehidupan sehari-hari santri melalui dialog antaragama, penghormatan terhadap perbedaan, dan pengembangan sikap inklusif (Azra, 2012). Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya memperkaya wawasan peserta didik tetapi juga berperan penting dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di masyarakat yang majemuk.

D. Gus Dur dan Pemikiran Pluralisme

KH. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Ia merupakan putra dari KH. Wahid Hasyim, seorang tokoh nasional sekaligus Menteri Agama Indonesia, dan cucu dari KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia (Barton, 2002). Latar belakang keluarga pesantrennya memberikan dasar kuat bagi Gus Dur dalam memahami dan mengembangkan tradisi keagamaan dan sosial Islam di Indonesia.

Gus Dur menempuh pendidikan pesantren secara tradisional, serta melanjutkan studi di Universitas al-Azhar, Kairo, dan Universitas Baghdad, yang memperkaya wawasan keagamaannya dengan perspektif internasional (Barton, 2002). Selain itu, ia juga menempuh pendidikan di Universitas Nasional Indonesia (UNAS) Jakarta dan di Belanda. Kombinasi pendidikan pesantren dan akademik modern menjadikan Gus Dur sosok intelektual Islam yang luas dan inklusif.

Karir Gus Dur sebagai ulama dan pemimpin sosial sangat menonjol, terutama ketika ia menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) periode 1984-1999. Dalam kepemimpinannya, Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, menjabat hingga tahun 2001 (Wahid, 2001).

Sepanjang hidupnya, Gus Dur aktif memperjuangkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan demokrasi, baik melalui perannya di NU maupun sebagai presiden. Pemikirannya tentang Islam yang inklusif dan berwawasan kebangsaan menjadikannya simbol moderasi beragama yang dihormati tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional (Bubalo & Fealy, 2005). Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009, meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang terus menginspirasi masyarakat Indonesia.

KH. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, dikenal luas sebagai tokoh yang sangat mengedepankan nilai keberagaman dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Menurut Gus Dur, keberagaman bukanlah sebuah hambatan, melainkan kekayaan yang harus dihargai dan dijaga demi terciptanya harmoni sosial di Indonesia yang pluralistik (Barton, 2002). Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk secara agama, suku, dan budaya, sehingga sikap toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Gus Dur menolak keras sikap eksklusivisme dan fundamentalisme yang berpotensi memecah belah umat dan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya menghormati perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah yang harus diterima dengan sikap terbuka dan penuh kasih sayang (Wahid, 2001). Ia juga mengajarkan bahwa keberagaman adalah anugerah Tuhan yang harus dipelihara melalui dialog dan saling pengertian antar kelompok.

Konsep toleransi menurut Gus Dur tidak hanya sebatas sikap pasif menerima keberadaan kelompok lain, tetapi juga aktif mengakui dan melibatkan mereka dalam kehidupan sosial dan

politik. Ia berpendapat bahwa toleransi adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia yang harus ditegakkan dalam kerangka hukum dan budaya bangsa (Bruinessen, 1994). Dalam konteks Islam, Gus Dur mempromosikan pendekatan inklusif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, sehingga Islam bisa hidup berdampingan dengan keyakinan lain secara damai.

Pemikiran Gus Dur tentang keberagaman dan toleransi juga tercermin dalam kebijakan dan sikapnya saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak minoritas, memperkuat dialog antaragama, serta mengkampanyekan nilai-nilai pluralisme sebagai pondasi demokrasi dan perdamaian (Bubalo & Fealy, 2005). Warisan pemikirannya tetap relevan dan menjadi rujukan penting dalam menghadapi tantangan intoleransi dan radikalisme di Indonesia saat ini.

Dengan demikian, pandangan Gus Dur mengenai keberagaman dan toleransi menegaskan bahwa membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis membutuhkan komitmen bersama untuk menghormati perbedaan, mengedepankan dialog, dan menegakkan keadilan sosial sebagai wujud nyata dari ajaran agama dan nilai-nilai kebangsaan.

KH. Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan Gus Dur, memiliki peran strategis dalam mengembangkan dunia pesantren sekaligus memperkuat masyarakat sipil di Indonesia. Sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang berbasis pesantren, Gus Dur meneruskan dan memperkaya tradisi pesantren dengan pendekatan yang progresif dan inklusif (Barton, 2002). Ia tidak hanya fokus pada pendidikan agama tradisional, tetapi juga memajukan pesantren sebagai institusi yang mampu menjawab tantangan modernitas dan dinamika sosial kontemporer.

Dalam dunia pesantren, Gus Dur menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran sosial dan politik. Ia mendorong pesantren untuk menjadi agen perubahan sosial yang aktif dalam membangun masyarakat yang toleran dan demokratis (Azra, 2012). Melalui kepemimpinannya di Nahdlatul Ulama, Gus Dur menguatkan jaringan pesantren sebagai basis sosial yang tidak hanya mendidik santri secara agama, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan dan kesadaran berbangsa.

Selain itu, Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam mengembangkan masyarakat sipil di Indonesia. Ia aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik yang mengedepankan pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Gus Dur memperjuangkan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta memperkuat lembaga-lembaga sosial yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara (Bubalo & Fealy, 2005). Peran ini sangat penting terutama pada masa transisi politik Indonesia pasca Orde Baru, di mana masyarakat sipil menjadi aktor kunci dalam proses reformasi.

Peran Gus Dur dalam masyarakat sipil juga tercermin dari usahanya menjembatani berbagai kelompok sosial dan agama yang berbeda, menciptakan dialog dan kerja sama lintas sektoral demi terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis (Wahid, 2001). Ia memandang bahwa masyarakat sipil yang kuat dan dinamis merupakan fondasi penting bagi pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan kontribusi yang signifikan di kedua bidang ini, Gus Dur telah meninggalkan warisan penting sebagai tokoh yang mengintegrasikan tradisi pesantren dengan semangat pembaruan sosial dan politik. Warisan ini terus menjadi inspirasi dalam upaya memperkuat pendidikan Islam moderat dan demokrasi berbasis masyarakat sipil di Indonesia.

Pembahasan

A. Internalisasi Nilai Pluralisme dalam Tradisi Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam menginternalisasi nilai pluralisme. Tradisi pesantren yang mengedepankan sikap toleransi, dialog antarumat beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya telah lama menjadi wadah bagi pengembangan pemahaman multikultural. Melalui interaksi sehari-hari antara santri dari berbagai latar belakang serta pengajaran nilai-nilai keagamaan yang inklusif, pesantren menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran Gus Dur yang menegaskan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pendidikan nilai-nilai pluralisme dan moderasi beragama yang relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia saat ini.

Konsep tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), dan ta'awun (kerja sama) merupakan prinsip-prinsip penting dalam tradisi keislaman yang menjadi dasar bagi kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Ketiga konsep ini memiliki peranan strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai, terutama dalam konteks keberagaman budaya dan agama seperti di Indonesia.

Tasamuh secara etimologis berarti sikap saling menghargai dan menerima perbedaan tanpa diskriminasi. Dalam konteks agama dan sosial, tasamuh merujuk pada kemampuan seseorang atau komunitas untuk menghormati keyakinan, praktik, dan identitas orang lain meskipun berbeda (Asad, 1986). Sikap tasamuh sangat penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama serta mencegah konflik sosial yang diakibatkan oleh intoleransi.

Tawassuth, atau moderasi, menekankan keseimbangan dalam bertindak dan berpikir, menghindari sikap ekstrem yang dapat menimbulkan perpecahan dan ketidakadilan (Esposito, 2003). Konsep tawassuth mengajak individu dan kelompok untuk bersikap adil, bijaksana, serta mengedepankan dialog dan toleransi sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan perbedaan. Dalam konteks pendidikan dan kehidupan beragama, tawassuth menjadi prinsip penting agar umat tidak terjebak pada pemahaman dogmatis yang sempit.

Sementara itu, ta'awun mengacu pada kerja sama dan tolong-menolong antarindividu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Saeed, 2006). Ta'awun bukan hanya sekadar tindakan sosial, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan spiritual yang diatur dalam ajaran Islam untuk menciptakan solidaritas dan sinergi sosial. Kerja sama lintas kelompok, agama, dan budaya menjadi kunci dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan produktif.

Ketiga konsep tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan demokratis. Dalam praktiknya, penerapan tasamuh, tawassuth, dan ta'awun dapat memperkuat pendidikan multikultural dan moderasi beragama, seperti yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Islam moderat, termasuk KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman dan kerja sama lintas agama (Wahid, 2001).

Dengan demikian, tasamuh, tawassuth, dan ta'awun merupakan landasan normatif yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang adil, toleran, dan produktif, terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia tidak hanya berperan dalam pengajaran ilmu agama, tetapi juga menjadi ruang penting bagi pembinaan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman melalui kegiatan lintas agama dan kultural. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan membangun dialog antarumat beragama serta memperkuat pemahaman multikultural di kalangan santri dan masyarakat pesantren secara luas (Azra, 2002).

Dalam konteks pesantren, kegiatan lintas agama/kultural dapat berupa dialog antaragama, seminar multikultural, kegiatan sosial bersama, serta perayaan bersama hari besar keagamaan dari berbagai agama. Melalui interaksi tersebut, santri diajak untuk memahami dan menghargai perbedaan keyakinan dan budaya sebagai bagian dari keragaman Indonesia yang kaya (Machmudi, 2012). Pendekatan ini menanamkan nilai-nilai toleransi, sikap saling menghormati, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan lintas agama/kultural di pesantren juga berfungsi sebagai media preventif terhadap radikalisme dan konflik sosial. Dengan membuka ruang dialog dan kerja sama antar kelompok agama, pesantren mampu mengurangi ketegangan serta membangun jaringan solidaritas sosial yang inklusif (Fealy & White, 2008). Selain itu, pengalaman nyata dalam interaksi lintas agama ini memperkuat pemahaman moderasi beragama yang diusung oleh tokoh-tokoh pesantren, termasuk KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang sangat menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman (Wahid, 2001).

Penerapan kegiatan lintas agama/kultural di pesantren menunjukkan bahwa institusi ini bukan hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga agen sosial yang efektif dalam mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan harmonisasi sosial. Dengan demikian, pesantren berkontribusi signifikan dalam membangun masyarakat Indonesia yang toleran, inklusif, dan damai.

B. Warisan Gus Dur dalam Kurikulum dan Budaya Pesantren

Kurikulum pesantren tradisional kini mengalami transformasi yang signifikan dengan berkembangnya pemikiran non-eksklusif yang lebih inklusif dan dialogis terhadap berbagai pandangan keagamaan dan sosial. Pendekatan kurikulum yang terbuka ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara normatif, tetapi juga mengakomodasi pemikiran kritis, pluralisme, dan nilai-nilai multikultural sebagai respon terhadap dinamika masyarakat modern yang majemuk (Barton, 2002).

Kurikulum pesantren non-eksklusif menekankan pentingnya keterbukaan terhadap perbedaan dan pengembangan toleransi dalam konteks keberagaman agama, budaya, dan sosial. Dengan demikian, pesantren berupaya melahirkan lulusan yang tidak hanya paham ajaran Islam secara mendalam, tetapi juga mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan kelompok masyarakat lain yang berbeda keyakinan (Azra, 2006). Pendekatan ini selaras dengan pemikiran Gus Dur yang menekankan pesantren sebagai ruang pendidikan yang inklusif dan mengedepankan nilai-nilai pluralisme serta moderasi beragama (Wahid, 2001).

Implementasi kurikulum terbuka dalam pesantren meliputi integrasi mata pelajaran yang mengajarkan dialog antaragama, hak asasi manusia, serta pendidikan karakter yang berorientasi pada penghargaan terhadap keberagaman. Kurikulum ini juga mendorong metode pembelajaran yang dialogis dan kritis, sehingga santri mampu mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan empati sosial (Suryadinata, 2011).

Melalui kurikulum yang terbuka terhadap pemikiran non-eksklusif, pesantren berperan penting dalam membentuk generasi muda Islam yang moderat, toleran, dan berwawasan luas, sekaligus memperkuat fondasi sosial dan keagamaan bangsa yang plural. Pendekatan ini menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang progresif dan inklusif.

Pendidikan akhlak dan kebangsaan yang berbasis inklusivitas merupakan pendekatan strategis dalam membangun karakter individu yang tidak hanya memiliki moralitas tinggi tetapi

juga kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan inklusif dalam pendidikan ini menekankan penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan (Banks, 2015).

Dalam konteks Indonesia yang sangat plural, pendidikan akhlak dan kebangsaan berbasis inklusivitas bertujuan mengembangkan sikap toleran, empati, dan solidaritas sosial, sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa tanpa menghilangkan keragaman yang ada (Hassan, 2014). Pendidikan ini mengintegrasikan nilai-nilai moral universal dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi pendidikan akhlak dan kebangsaan inklusif menuntut kurikulum dan metode pembelajaran yang dialogis, reflektif, serta berorientasi pada pengalaman sosial nyata yang mendorong siswa untuk berinteraksi dan belajar dari keberagaman (Nieto & Bode, 2018). Hal ini memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami konsep moral dan nasionalisme secara teoritis, tetapi juga menginternalisasikannya dalam perilaku sehari-hari yang menghormati perbedaan.

Pendidikan inklusif ini selaras dengan pandangan tokoh-tokoh kebangsaan dan pemikir pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan KH. Abdurrahman Wahid yang menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan semangat kebangsaan yang inklusif sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa (Dhofier, 1994; Wahid, 2001). Dengan demikian, pendidikan akhlak dan kebangsaan berbasis inklusivitas menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

C. Tantangan dan Peluang

Pendidikan pesantren di Indonesia menghadapi berbagai tantangan internal yang signifikan, terutama berkaitan dengan sikap konservatisme dan resistensi terhadap perubahan. Konservatisme dalam konteks pesantren merujuk pada kecenderungan mempertahankan tradisi, nilai-nilai, dan metode pembelajaran yang sudah lama berlaku tanpa membuka ruang yang cukup untuk inovasi atau pemikiran kritis yang lebih progresif (Noer, 1980). Sikap ini sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian sosial dan kekhawatiran terhadap hilangnya identitas keagamaan yang dianggap sakral.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan utama dalam pengembangan pesantren, terutama dalam upaya integrasi nilai-nilai pluralisme dan moderasi beragama ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Banyak pesantren yang merasa bahwa pengenalan pemikiran non-eksklusif atau pendidikan lintas agama dapat mengancam kesucian ajaran Islam yang diajarkan secara tradisional (Azra, 2002). Akibatnya, proses transformasi pesantren menuju institusi pendidikan yang lebih inklusif dan terbuka sering kali mengalami perlawanan dari kalangan internal yang konservatif.

Tantangan ini berimplikasi pada lambatnya adaptasi pesantren terhadap dinamika sosial yang semakin kompleks dan pluralistik di Indonesia. Padahal, pesantren sebagai institusi pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pembelajaran nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme jika mampu mengatasi sikap konservatif dan resistensi tersebut (Barton, 2002). Pendekatan dialogis dan pembinaan internal yang melibatkan para kiai dan santri secara bertahap diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya moderasi dan inklusivitas dalam pendidikan pesantren.

Dengan demikian, mengatasi tantangan internal berupa konservatisme dan resistensi merupakan langkah krusial agar pesantren dapat terus berperan sebagai agen perubahan sosial yang adaptif dan relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Polarisasi sosial merupakan tantangan eksternal yang signifikan bagi pesantren dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga pendidikan dan agen moderasi beragama. Polarisasi sosial mengacu pada pembelahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan, seringkali berdasarkan identitas agama, etnis, atau politik, yang dapat memicu konflik dan ketegangan sosial (Sihombing, 2019). Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas sosial secara umum, tetapi juga berdampak langsung pada dinamika internal pesantren dan interaksi antara santri serta masyarakat di sekitarnya.

Pesantren yang beroperasi di tengah masyarakat yang terpolarisasi sering menghadapi tekanan untuk berpihak atau menyesuaikan diri dengan salah satu kelompok, yang dapat mengancam independensi dan fungsi pesantren sebagai ruang inklusif dan dialogis (Crouch, 2013). Polarisasi ini juga menimbulkan risiko radikalisasi dan intoleransi yang berpotensi memecah belah kohesi sosial serta menghambat upaya pendidikan pluralisme dan moderasi beragama yang selama ini menjadi ciri khas pesantren moderat (Hasan, 2016).

Dampak polarisasi sosial ini mendorong pesantren untuk menguatkan kapasitas internal dalam membangun narasi damai dan toleran, sekaligus menjalin kerja sama lintas komunitas sebagai upaya mitigasi konflik (Azra, 2006). Peran pesantren sebagai mediator sosial sangat penting untuk mengatasi fragmentasi sosial yang terjadi, terutama dengan menanamkan nilai-nilai keberagaman, persatuan, dan solidaritas dalam proses pendidikan (Barton, 2002).

Oleh karena itu, tantangan eksternal berupa polarisasi sosial menuntut pesantren untuk terus beradaptasi dan mengembangkan strategi edukatif yang responsif, sehingga mampu mempertahankan perannya sebagai institusi yang mempromosikan kedamaian dan harmoni di tengah keragaman sosial masyarakat Indonesia.

Pesantren memiliki potensi strategis untuk memperkuat perannya sebagai pelopor harmoni sosial di tengah masyarakat Indonesia yang sangat plural. Sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang telah lama menjadi pusat pengajaran nilai-nilai keagamaan dan budaya, pesantren berposisi unik dalam membentuk karakter dan sikap toleran serta inklusif di kalangan santri dan masyarakat luas (Azra, 2006). Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan multikultural, moderasi beragama, dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Pertama, pesantren dapat mengembangkan program-program pendidikan yang mengedepankan dialog lintas agama dan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran formal maupun non-formal. Hal ini sejalan dengan ajaran dan pemikiran tokoh seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman sebagai landasan hidup bermasyarakat yang damai (Barton, 2002). Dengan membekali santri kemampuan komunikasi antaragama dan empati sosial, pesantren berkontribusi dalam membangun jaringan solidaritas yang luas dan resistensi terhadap radikalisme.

Kedua, pesantren juga berpeluang menjadi pusat riset dan pengembangan kajian keislaman yang inklusif dan kontekstual, yang menjawab tantangan sosial dan keagamaan masa kini. Dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner dan dialogis, pesantren dapat menjadi sumber solusi dalam konflik sosial serta penyebaran narasi damai di tengah polarisasi yang terjadi di masyarakat (Fealy & White, 2008).

Selain itu, pesantren sebagai institusi masyarakat sipil dapat menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lintas agama untuk menginisiasi kegiatan sosial yang mempromosikan toleransi dan persatuan. Kegiatan bersama seperti bakti sosial, perayaan bersama hari besar keagamaan, dan forum dialog dapat memperkuat harmoni sosial sekaligus meningkatkan citra pesantren sebagai agen perubahan positif (Machmudi, 2012).

Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut secara optimal, pesantren tidak hanya melanjutkan tradisi pendidikan agama, tetapi juga memperkuat fondasi sosial Indonesia yang plural dan damai. Oleh karena itu, pengembangan peran pesantren sebagai pelopor harmoni sosial perlu didukung oleh kebijakan yang proaktif serta partisipasi aktif seluruh elemen pesantren dan masyarakat.

KESIMPULAN

Warisan pluralisme Gus Dur telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembentukan paradigma pendidikan multikultural di lingkungan pesantren. Pemikiran Gus Dur yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman agama, etnis, dan budaya menjadi pijakan fundamental bagi pesantren untuk mengembangkan model pendidikan yang inklusif dan dialogis. Warisan ini membuka ruang bagi pesantren tidak hanya untuk melestarikan tradisi keilmuan Islam, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai toleransi, moderasi, dan kerja sama antarumat beragama.

Implementasi nilai-nilai pluralisme tersebut dalam pendidikan pesantren memungkinkan terwujudnya suasana belajar yang terbuka dan ramah terhadap perbedaan, sehingga menghasilkan generasi santri yang tidak hanya memahami ajaran agama mereka secara mendalam, tetapi juga mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dengan cara ini, pesantren menjadi lembaga yang tidak hanya berperan sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif mendorong perdamaian, kerukunan, dan solidaritas sosial.

Lebih jauh, warisan Gus Dur menginspirasi pesantren untuk terus beradaptasi dengan tantangan zaman yang semakin kompleks, terutama di tengah dinamika sosial-politik yang sering menghadirkan polarisasi dan intoleransi. Dengan mengedepankan pendekatan pendidikan yang berbasis nilai pluralisme, pesantren dapat memperkuat peranannya sebagai ruang pendidikan yang membangun jembatan antar kelompok masyarakat, serta sebagai pelopor harmoni sosial di tingkat lokal maupun nasional.

Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia pesantren untuk terus menginternalisasi dan mengembangkan warisan pluralisme Gus Dur melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan lintas budaya serta agama. Hal ini tidak hanya akan memperkaya pengalaman pendidikan santri, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang damai dan inklusif dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal: Menggagas Pendidikan Alternatif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asad, M. (1986). *The Idea of an Anthropology of Islam*. Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University.

- Azra, A. (2002). *Islam Kontemporer: Tradisi, Akar Radikalisme, dan Arabisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- _____ (2006). *Islam dan Pendidikan: Tradisi dan Modernisasi dari Masa ke Masa*. Jakarta: Kompas.
- _____ (2011). *Islam and the Indonesian World: The Moderate Path*. Jakarta: Syarikat Islam Press.
- _____ (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Sensus Penduduk 2020: Kewarganegaraan, Suku, Agama, dan Bahasa Sehari-hari*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Menurut Agama*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Banks, J. A. (2010). *Multicultural Education: Characteristics and Goals*. In J. A. Banks & C. A. McGee Banks (Eds.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (7th ed., pp. 3-30). Hoboken, NJ: Wiley.
- _____ (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- _____, & Banks, C. A. M. (2010). *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (7th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bruinessen, M. van. (1994). *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Bubalo, A., & Fealy, G. (2005). *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia*. Sydney: Lowy Institute for International Policy.
- Crouch, M. (2013). *Religion, Conflict and Education in Indonesia*. Routledge.
- Departemen Agama RI. (2020). *Profil Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Esposito, J. L. (2003). *The Oxford Dictionary of Islam*. New York, NY: Oxford University Press.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Gay, G. (2018). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice* (3rd ed.). New York, NY: Teachers College Press.
- Haryatmoko. (2017). *Pendidikan Kewargaan Multikultural: Membangun Karakter dan Peradaban*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, N. (2016). *Radikalisme Islam dan Negara: Studi Gerakan Islam dan Reaksinya*. Jakarta: LP3ES.
- Hassan, R. (2014). *Education, Islam, and Society: Anthropological Perspectives*. London: Routledge.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Lukens-Bull, R. (2005). *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*. New York: Palgrave Macmillan.

-
- Machmudi, Y. (2012). *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Muhaimin. (2020). *Revitalisasi Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa*. Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 134–145.
- Mukhlis. (2014). *Struktur dan Dinamika Organisasi Pesantren di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 45-60.
- Mulyadi, M. (2018). *Bahasa dan Multikulturalisme dalam Konteks Kebhinekaan Indonesia*. Jurnal Sosioteknologi, 17(1), 12–22.
- Muslim. (2007). *Sahih Muslim* (trans. A. Siddiqi). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Nasr, S. H. (2002). *Islam and the Plurality of Modernity*. In *Islam and Modernity: Key Issues and Debates* (pp. 45-67). Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Nieto, S. (2010). *The Light in Their Eyes: Creating Multicultural Learning Communities* (10th Anniversary Edition). New York, NY: Teachers College Press.
- _____ & Bode, P. (2018). *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* (7th ed.). New York, NY: Pearson.
- Noer, D. (1980). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York, NY: Routledge.
- Sihombing, D. (2019). *Polarisasi Sosial dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subagyo, M. (2021). *Pendidikan Multikultural di Tengah Pluralitas Bangsa: Urgensi dan Implikasi*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 26(3), 231–243.
- Suryadinata, L. (2011). *Pluralism and Moderation in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Wahid, A. (2001). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Zarkasyi, A. (2011). *Reformasi Pendidikan Pesantren: Studi tentang Modernisasi Kurikulum di Pesantren*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.